

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Sari, 2012) .

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. (Abdurahmat, Buku Panduan Kerja Pendamping PKH:2008, hlm. 7). Amirulla (2002, hlm. 45) menyatakan, efektivitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan telah diperoleh efektivitas operasionalnya.

Sedangkan menurut Sigit (2003, hlm. 2) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat. Hal ini guna untuk pencapaian tujuan yang tepat yang telah dirumuskan dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan menurut (Ahmad, 1996. hlm. 2) mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan manajer, artinya manajemen yang efektif tidak selalu harus disertai efisiensi yang maksimum. Efektivitas memiliki empat sifat utama bagi organisasi, antara lain :

- a. Berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu

- b. Menjamin terhadap perkembangan industri yang pertumbuhan sehingga melahirkan suatu polater tentu dalam kenyataan
- c. Menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dan menjalankan program
- d. Mengikutsertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan

Berdasarkan uraian diatas dapat bahwa efektivitas merupakan suatu aktifitas yang efektif untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Pendekatan Efektivitas

Dalam menilai efektivitas program, Tayibnapi (2000, hlm. 23-36) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

- a. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*).

Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sabanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.

- b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*).

Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

- c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*).

Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.

- d. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*).

Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen

yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

e. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*).

Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

3. Pengukuran Efektivitas

Adapun menurut Sari (2012, hlm. 4) *kriteria* atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus

mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Rosalina Sari (2012, hlm. 5) menjelaskan kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas;
2. Kemampuan adaptasi kerja;
3. Kepuasan kerja;
4. Kemampuan berlabar dan;
5. Pencarian sumber daya.

Sedangkan Steers (1999, hlm. 53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam meningkatkan kesadaran ekonomi kelas menengah bawah.

B. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka. memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. (Buku Kerja Pendamping PKH, 2009: 1).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2018 tentang “Program Keluarga Harapan” menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Menurut Purwanto (2013), Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam hal mendapatkan akses pelayanan

kesehatan dan pendidikan dasar. Peserta Program Keluarga Harapan adalah rumah tangga sangat miskin yang sesuai dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan memenuhi beberapa kriteria program, yaitu memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (pedoman PKH 2012).

Program Keluarga Harapan terdiri atas tiga komponen yaitu antara lain:

a. Pendidikan

Menurut Pasal 49 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

b. Kesehatan

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang “Kesehatan”, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis.

c. Kesejahteraan Sosial

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2009 tentang “Kesejahteraan Sosial”, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang diberikan tersebut diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat (miskin) agar lebih peduli terhadap pendidikan dan kesehatan generasi penerusnya, sehingga mampu menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan, dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di tujuh provinsi, sampai dengan tahun 2015, PKH telah dilaksanakan di 34 (Tiga puluh empat) Provinsi dan mencakup 472 (Empat ratus

tujuh puluh dua) Kabupaten/Kota dan 6.080 (Enam ribu delapan puluh) Kecamatan. Target peserta PKH pada tahun 2016 mencapai 6 juta keluarga miskin di 514 Kabupaten/Kota (Pedoman pelaksanaan PKH 2016).

2. Fungsi Program Keluarga Harapan

Menurut Pasal 2 Ayat 1-9 UU RI No.46 Tahun 2015 tentang “Kementerian Sosial” Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

3. Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

Penerima bantuan PKH yang selanjutnya disebut peserta PKH adalah RTSM/KSM yang berdomisili di lokasi terpilih yang memiliki satu atau beberapa kriteria :

- a. Memiliki anak SD/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat.
- b. Memiliki anak SMP/Madrasah Tsanawiyah/ sederajat.

- c. Memiliki anak usia 7-18 tahun yang belum menamatkan pendidikan dasar.
- d. Memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau.
- e. Memiliki anak balita.
- f. Memiliki anak usia 5-7 tahun (anak pra sekolah).

4. Hak dan Kewajiban Program Keluarga Harapan

Calon penerima bantuan terpilih wajib menandatangani persetujuan ada formulir validasi untuk memenuhi ketentuan PKH (sesuai yang tercantum dalam pedoman umum) sebagai berikut :

- a. Memeriksa kandungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar.
- b. Melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu nifas sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar.
- c. Mengantar anak usia 0-5 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar.
- d. Mengantarkan anak usia lebih kecil dari 7 tahun yang belum sekolah ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- e. Mendaftarkan dan menyekolahkan anak usia 7-15 tahun serta anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

5. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan

Besaran bantuan yang diterima oleh peserta PKH bervariasi berdasarkan jumlah anggota keluarga yang dihitung menurut ketentuan penerima bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan akan bisa berubah di kemudian hari sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta PKH tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi peserta PKH dengan anak di bawah 7 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak di hitung berdasarkan jumlah anak.

Table 2. 1 Kategori Bantuan PKH

Kategori Bantuan	Bantuan Per RTSM/KSM/Tahun
Bantuan bagi RTSM yang memiliki : a. Anak usia dibawah 6 tahun b. Ibu hamil/menyusui c. Anak peserta pendidikan setara SD/MI,SMP/MTS,SMA/ MA	Rp. 1.890.000,00
Bantuan bagi LANSIA	Rp. 2.000.000,00
Bantuan bagi DISABILITAS	Rp. 2.000.000,00

Sumber : Diolah Peneliti, (2022)

C. Kajian Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya.

Menurut Djumali (2013, hlm. 1) pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Menurut Sutrisno (2016, hlm. 29) pendidikan merupakan aktivitas yang bertautan, dan meliputi berbagai unsur yang berhubungan erat antara unsur satu dengan unsur yang lain. Pendidikan juga memiliki definisi secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha menyiapkan dan membekali generasi muda ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam memecahkan masalah yang prosesnya berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat, baik jasmani maupun rohani.

2. Tujuan Pendidikan

Menurut Elfachmi (2016, hlm. 16) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan, oleh karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi: memberikan arahan kepada segenap kegiatan pendidikan dan sebagai sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

Pada praktik pendidikan, khususnya sistem persekolahan, dalam rentang anatara tujuan umum dan tujuan yang sangat khusus, terdapat pula sejumlah tujuan antara yang berfungsi untuk menjembatani pencapaian tujuan umum dari sejumlah tujuan khusus. Pada umumnya, terdapat empat jenjang tujuan, yaitu:

- a. tujuan umum merupakan tujuan pendidikan secara nasional. Pancasila merupakan landasan dari tujuan umum pendidikan nasional di Indonesia;
- b. tujuan institusional merupakan tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya;
- c. tujuan kurikuler merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu bidang studi atau mata pelajaran dan;
- d. tujuan instruksional merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu materi tertentu-penguasaan materi tertentu.

Seperti dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk mengubah segala macam kebiasaan buruk yang ada di dalam diri manusia menjadi kebiasaan baik yang terjadi selama masa hidup, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang mampu bersaing dan menjawab berbagai tantangan di masa depan.

3. Karakteristik Pendidikan

Menurut Fakry Gaffar sebagaimana dikutip oleh Kesuma (2013, hlm. 5) pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Menurut Setiawati (2017, hlm. 350), pendidikan karakter merupakan suatu ilmu yang diberikan untuk mewujudkan negara yang dapat dipandang oleh dunia internasional maupun Tuhan, bahwa bangsa tersebut berakhlak, berbudi perkerti dan bermartabat. Menurut Thomas Lickona sebagaimana dikutip oleh Ma'arif (2018, hlm. 32) pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis. Menurut Citra (2012, hlm. 238), menyatakan bahwa:

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.

Unsur-unsur yang ada di dalam proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu: peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, serta lingkungan pendidikan (Elfachmi, 2016, hlm. 15). Peserta didik merupakan subjek yang dibimbing atau dididik. Pendidik adalah orang yang mendidik. Interaktif edukatif adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik, interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal-balik antara peserta didik yang terarah kepada tujuan pendidikan.

4. Manfaat Pendidikan

Manfaat pendidikan menurut Elfachmi (2016, hlm. 16) adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan ilmu yang akan dibutuhkan untuk masa depan
- b. Belajar diluar sekolah bisa menambah wawasan yang lebih luas
- c. Dengan mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas, kita dapat meraih cita-cita yang kita impikan

d. Menjadikan manusia memiliki budi pekerti yang luhur

Sesuai dengan pengertian dan tujuan pendidikan, pendidikan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan semuanya agar menjadi manusia yang seutuhnya, karena sejatinya pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

5. Fungsi Pendidikan

Pendidikan membawa misi mulia sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan, baik alami maupun buatan. Pendidikan nasional dikonsepsikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan sesungguhnya adalah memebangun manusia yang beriman, cerdas, kompetitif, dan bermartabat. Beriman mengandung makna bahwa manusia mengakui adanya eksistensi Tuhan dan mengikuti ajaran dan menjauhi larangannya. (Danim, 2010, hlm. 45)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan adalah sebuah mnfaat dari hasil pendidikan yang dapat dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar fungsi pendidikan yaitu mengubah pola pikir manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

D. Masyarakat Kelas Sosial Menengah Kebawah

Berikut merupakan macam-macam warga kelas menengah kebawah:

1. Macam-Macam Masyarakat Kelas Sosial Menengah Kebawah di

Indonesia

Mosca dalam (Damsar, 2010)membedakan antara kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, antara orang kaya dan orang miskin. Namun Maliki (2010) membedakan menjadi tiga kelas atau lebih, yakni:.

- a. Kelas atas, kelas ini ditandai oleh besarnya kekayaan, pengaruh baik dalam sektorsektor masyarakat perseorangan ataupun umum, berpenghasilan tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kestabilan kehidupan keluarga.
- b. Kelas menengah, kelas ini di tandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, penghasilan dan mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap kerja keras,

pendidikan, kebutuhan menabung dan perencanaan masa depan, serta mereka dilibatkan dalam kegiatan komunitas.

- c. Kelas bawah, kelas ini biasanya terdiri dari kaum buruh kasar, penghasilannya pun relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu menabung, lebih berusaha memenuhi kebutuhan langsung daripada memenuhi kebutuhan masa depan, berpendidikan rendah, dan penerima dana kesejahteraan dari pemerintah. Bahkan seorang ilmuwan yang bernama Warren (Horton, 2006) merinci tiga kelas ini menjadi empat kelas yaitu:

- 1) Kelas atas-atas (*upper-upper class*) mencakup keluarga-keluarga kaya lama, yang telah berpengaruh dalam masyarakat dan sudah memiliki kekayaan yang begitu lama, sehingga orang-orang tidak lagi bisa mengingat kapan dan bagaimana cara keluarga-keluarga itu memperoleh kekayaannya.
- 2) Kelas atas bawah (*lower upper class*) mempunyai jumlah uang yang sama, tetapi mereka belum terlalu lama memilikinya dan keluarga ini belum lama berpengaruh terhadap masyarakat.
- 3) Kelas menengah atas (*upper middle class*) mencakup kebanyakan pengusaha dan orang profesional yang berhasil, yang umumnya berlatar belakang keluarga baik dan berpenghasilan yang menyenangkan.
- 4) Kelas bawah bawah (*lower-lower class*) meliputi para pekerja tidak tetap, penganggur, buruh musiman. Akan tetapi dalam mengkaji pembagian kelas sosial, disini penulis menitikberatkan pembagian kelas sosial menjadi tiga kelas, yakni kelas atas, menengah, dan bawah.

2. Pengertian Masyarakat Kelas Sosial Menengah Kebawah

Masyarakat merupakan terjemahan dari *citizenship* yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama penduduk, orang setanah air, masyarakat, mengandung arti sebagai peserta dari suatu organisasi atau perkumpulan, bisa juga diartikan sebagai sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu daerah atau tempat dengan ikatan aturan tertentu. Adapun menurut

Kamus Sosiologi adalah sekelompok orang yang menduduki wilayah geografis tertentu, memiliki kebudayaan sama dan mampu bertindak secara kolektif untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut ilmu sosiologi adalah sekelompok manusia yang tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang ditentukan bersama.

Kelas menengah biasanya diisi oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil. Biasanya ditempati oleh orang-orang dengan tingkat yang sedang-sedang saja. (Ahmadi, 2014, hlm. 192)

Kelas bawah, kelas ini biasanya terdiri dari kaum buruh kasar, penghasilannya pun relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu menabung, lebih berusaha memenuhi kebutuhan langsung daripada memenuhi kebutuhan masa depan, berpendidikan rendah, dan penerima dana kesejahteraan dari pemerintah. Bahkan seorang ilmuwan yang bernama Warren (dalam Horton, 2006) menyebutkan Kelas bawah bawah (*lower-lower class*) meliputi para pekerja tidak tetap, penganggur, buruh musiman.

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, atau Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan . Pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini di pahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak di batasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah di batasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapat masyarakat yang ada di sekitarnya. Berdasarkan kutipan pada (www.modalrakyat.id)

3. Karakteristik Masyarakat Kelas Sosial Menengah Kebawah

Karakteristik masyarakat kurang mampu berdasarkan basis data terpadu hasil pendataan program perlindungan sosial:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsimakanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi oleh pemerintah;

- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga dan;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam memahami bagaimana sebuah fenomena dikaji dan diteliti. Kajian pada penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan baik dari teori, metodologi, ataupun topik penelitian dengan penelitian penulis sangat membantu penulis untuk bisa memahami dan menulis penelitian ini.

1. Sri Sutjiatmi (2019) dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu: penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pelaksanaan pemutakhiran data KPM, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan verifikasi komitmen fasilitas pendidikan (fasdik), fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan sosial.
2. Beni dan Blasius (2020) dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan di daerah perbatasan yang terlihat dari menurunnya angka putus sekolah, tingginya partisipasi mengunjungi fasilitas kesehatan baik untuk kegiatan posyandu maupun pemeriksaan kesehatan serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang bersumber dari penyisihan dana bantuan bantuan yang diterima.
3. Najidah dan Lestari (2019) dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran,

ketepatan tujuan, ketepatan biaya dalam program keluarga harapan (PKH) belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, untuk selanjutnya dalam ketepatan berpikir sudah beroperasi dengan baik. Faktor yang menghambat efektifitas program adalah belum adanya koordinasi, belum adanya perencanaan dan belum berjalannya ketepatan pelayanan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam program keluarga harapan agar tetap sesuai antara data dengan kenyataan, terciptanya tujuan yang jelas dan diharapkan terciptanya kebijakan transparansi penggunaan dana untuk pencapaian efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Rowosari.

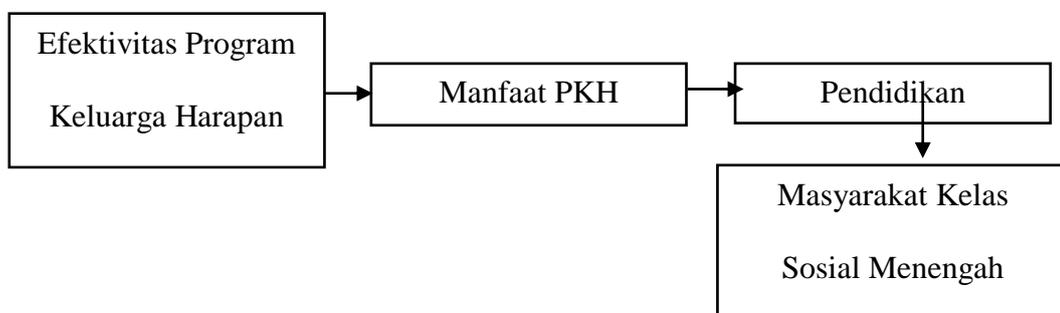
4. Yunarmi, dkk (2019) dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Program Keluarga Harapan di Desa Daha sudah dijalankan dengan baik dan efektif, dilihat dari jumlah penduduk miskin setiap tahunnya semakin berkurang dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Program keluarga harapan dijalankan sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan SOP yang digunakan pada pedoman dari pusat dan Kabupaten Dompu. Sosialisasi awal sudah dilakukan dengan baik, pemuktahiran data selalu dilakukan pendamping setiap pertemuan, verifikasi pendidikan dan kesehatan sudah dijalankan dengan baik, hanya saja fasilitas untuk pendamping PKH masih kurang.

F. Kerangka Pemikiran

Program keluarga harapan (PKH) adalah program yang dibuat oleh pemerintah bekerjasama dengan dinas sosial, bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu salah satunya dalam bidang pendidikan. Dengan adanya program PKH ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah warga miskin, menurunkan kesenjangan untuk meningkatkan pembangunan dalam pendidikan, diharapkan program ini dapat mengurangi jumlah anak-anak putus sekolah karena masalah ekonomi, semoga mereka bisa melanjutkan pendidikan untuk bekal mereka di masa depan serta meningkatkan tara hidupnya juga untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hal tersebut yang membuat saya ingin meneliti terkait masalah ini apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik untuk mengurangi kemiskinan dan masalah putus sekolah sekaligus sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Manfaat pendidikan yaitu agar kehidupan semuanya menjadi manusia yang seutuhnya, karena sejatinya pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks.



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir